

JURNAL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PASAL 118
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



**Diajukan oleh :
JULIO SEBASTIAN**

NPM	: 100510415
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PASAL 118
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



Diajukan oleh :

JULIO SEBASTIAN

NPM : 100510415
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui

Dosen Pembimbing,

Tanggal

: 1 Desember 2015

G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan :

Mengesahkan



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

- I. Judul** : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- II. Nama** : Julio Sebastian dan G. Aryadi, S.H., M.H.
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

IV. Abstrack

This legal writing entitled "Judicial Review of Corporation Criminal Liability on Article 118 of Law No. 32/2009 about Environment Protection and Maintanance, has purpose to collect data about corporation criminal liability on environment criminal law.

This law research is a normative law research. The normative law research is a research by doing abstraction through deductive process from positive law norm of law principle studies which contain in law regulations. The character of research used by the writer is analyze descriptive, that the writer try to collect data which is suitable with the research object, then after data has collected, that data being analyzed using normative judicial approach, which finding suitability between the research object and positive law applied.

This legal writing will discuss about corporation criminal liability in environment criminal law. The corporation can be accounted criminally if an environment criminal act done for corporation interest.

The corporation criminal liability system in Law No. 32/2009 about Environmmnet Protection and Maintanance still has not been asked directly to corporation, due to criminal liability be downed to those who has competence to represent corporation inside and outside the court.

Keyword : Corporation, Criminal Liability, Corporation Criminal Liability.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Perwujudan dalam pemenuhan hak asasi dan hak konstitusional setiap

warga negara tersebut, ditandai dengan penggunaan sumber daya alam yang harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Indonesia sebagai negara berkembang, masih memerlukan banyak pembangunan di segala sektor yang dilakukan secara berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut mewajibkan negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi segenap rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Setiap kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup agar tetap mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Ketersediaan sumber daya alam di Indonesia baik secara kuantitas ataupun kualitas tersebar secara tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun sehingga sangat berpotensi mendukung terjadinya pencemaran dan perusakan pada lingkungan yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Didasarkan pada hal itu, maka lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan

berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan mencakup : (1) kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan, perumahan dan lain-lain; (2) kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat dan lain-lain; serta (3) kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.¹

Kegiatan pembangunan tentu dipengaruhi oleh modernisasi yang semakin meningkat di setiap negara. Arus modernisasi terlihat nyata dalam lalu lintas globalisasi yang mewabah hampir di setiap negara. Globalisasi telah membawa era baru dalam kemakmuran ekonomi dan telah membuka jalur besar pembangunan. Bidang ekonomi sebagai pendorong utama globalisasi, ditandai dengan meningkatnya arus informasi, uang dan perusahaan multinasional yang bergerak sangat cepat.² Kemajuan peradaban dan budaya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama kecanggihan informasi,

¹ R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 189.

² Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan ke-4/Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1.

komunikasi dan transportasi sudah mendunia dan menjadikan bumi semakin kecil seolah-olah tak terbatas.³

Nafas globalisasi juga dirasakan oleh bangsa Indonesia yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah perusahaan-perusahaan (korporasi) yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Meningkatnya jumlah korporasi sebagai bagian dari dampak globalisasi, telah menciptakan suatu perhatian khusus terhadap dampak lingkungan hidup. Hampir di setiap bidang usaha, seperti pertambangan, perdagangan, industri, pemanfaatan sumber daya alam dan lain-lain, berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan.

Dewasa ini, merupakan realita bahwa korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Peranan dunia swasta dalam pertumbuhannya lebih memberikan peranan kepada korporasi. Banyak perhatian yang telah diberikan kepada korporasi yang melalaikan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan menimbulkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan sebagai akibat dari kegiatan produksi yang dilakukan⁴, sehingga saat ini kedudukan korporasi kerap melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup.

³ *Ibid.*

⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 285.

Kejahatan korporasi dipandang sebagai kejahatan yang bersifat organisatoris.⁵ Fokus utama kejahatan korporasi adalah pada sektor produksi, tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan keuntungan korporasi dan/atau mengurangi biaya-biaya produksi.⁶ Kekhasan dari kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup adalah bahwa ia dilakukan oleh korporasi atau agen-agennya (manager, karyawan, pemilik) terhadap lingkungan hidup⁷ (*environmental crime*)⁸, dengan cara melakukan kegiatan produksi dan melalaikan kewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan pada media lingkungan hidup. Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan korporasi terhadap lingkungan hidup lebih besar dibandingkan dengan kerugian atas kejahatan yang dilakukan individual.⁹

Kemajuan teknologi di berbagai bidang, menyebabkan pertumbuhan korporasi sebagai salah satu jaringan perusahaan multinasional tidak dapat dihindarkan. Selain berpengaruh terhadap perekonomian dan kondisi lingkungan, peran korporasi sudah barang tentu menimbulkan konsekuensi yuridis tersendiri bagi sistem hukum Indonesia, terkhusus sistem hukum pidana di Indonesia. Dari sisi hukum pidana dan

⁵ H. Setiyono, 2009, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat/Edisi Kedua, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 19.

⁶ Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Cetakan Ke-1, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 10.

⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 10.

kriminologi, porsi perhatian terhadap hukum ekonomi semakin besar, sebab penyimpangan dalam hukum ekonomi yang merupakan tindak pidana dilihat sebagai sesuatu yang istimewa. Apabila tindak pidana dalam hukum ekonomi dilakukan oleh korporasi, maka korporasi harus ditetapkan sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.¹⁰

Penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana, tidak lepas dari modernisasi sosial. Dampak modernisasi harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu, semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula.¹¹ Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, tetapi dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi, terorganisasi, jelas dan terperinci.¹² Tanda-tanda adanya modernisasi harus disikapi dengan menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana dengan tujuan untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi.¹³

Di Indonesia, pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP.¹⁴ Sebagaimana yang diketahui bahwa pada awalnya hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia belum mengatur tentang korporasi sebagai

¹⁰ H. Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 25.

¹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno., *Op. Cit.*, hlm. 43.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 68.

subyek hukum pidana, karena KUHP sebagai hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia hanya menentukan bahwa subyek hukum pidana adalah hanya orang pribadi (alamiah).¹⁵ hal tersebut tentu tidak lepas dengan pembentukan KUHP lewat asas konkordansi dari W.v.S Belanda yang pada saat itu banyak dipengaruhi doktrin atau pandangan yang berpegang teguh pada adagium badan hukum tidak dapat dipidana (*universitas delinquere non potest*) dengan anggapan bahwa korporasi tidak memiliki *mens rea* (keinginan untuk berbuat jahat) serta korporasi bukan seorang pribadi meskipun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi.¹⁶ Tidak hanya itu, korporasi (*rechtspersoon*) sebagai subyek hukum dalam hukum pidana penuh dengan hambatan teoritis. Hal tersebut disebabkan karena begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (*fiction theory*) yang dicetuskan oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai suatu kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya ada pada manusia alamiah.¹⁷

Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sudah bergeser. Doktrin yang mewarnai W.v.S Belanda 1886 yakni *universitas*

¹⁵ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif : Suatu Terobosan Hukum*, Cetakan.1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

delinquere nonpotest sudah mengalami perubahan sehubungan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).¹⁸ Kedudukan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana juga telah terdapat suatu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/Kr/1996 tanggal 1 Maret 1969 dalam perkara PT Kosmo dan PT Sinar Sahara yang menyatakan bahwa suatu badan hukum tidak dapat disita.¹⁹ Muladi berpendapat bahwa pandangan Mahkamah Agung tersebut tepat sekali, sebab yang disita adalah barang atau benda, sedangkan PT Kosmo dan PT Sinar Sahara bukan benda atau barang akan tetapi merupakan subyek hukum.²⁰

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi. *Corporate crime* bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan beserta kompleksitasnya. Di sisi lain, ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia belum dapat menjangkaunya dan senantiasa ketinggalan untuk merumuskannya.

¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 17.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 50.

²⁰ *Ibid.*

Tindak pidana dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*. Pada gilirannya yang mengundang perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau *corporate liability* mengingat bahwa di dalam KUHP Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum adalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke person*). Jika suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan untuk dan atau atas nama suatu korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana atau mengakibatkan kerugian dan harus diberikan sanksi, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah pribadi korporasi itu sendiri atau para pengurusnya?

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum/skripsi dengan judul :
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
PASAL 118 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?”

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMA MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjadi permasalahan hukum dari judul penulisan hukum ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data-data terkait dengan penulisan hukum ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab II Pembahasan berisi penguraian tentang tinjauan umum mengenai korporasi, yang membahas tentang pengertian korporasi, ciri-ciri

korporasi dan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Selanjutnya, akan dijelaskan tentang tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, konsep-konsep tentang pertanggungjawaban korporasi dan teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Selanjutnya, akan dijelaskan juga mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai bahan pembelajaran bersama.

BAB III : PENUTUP

Bab III Penutup berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan hukum sebagai hasil dari penelitian. Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat jawaban atas masalah yang telah dirumuskan pada awal bab penulisan hukum ini. Adapun saran yang diuraikan penulis bersifat normatif terhadap pengembangan ilmu hukum

tentang peradilan pidana agar dapat meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang melakukan kejahatan / tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dilakukan dengan bentuk pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembebanan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dikenakan kepada korporasi atas perbuatan yang dilakukan sebagai pelaku fungsional (*functioneel daderschap*). Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh agen korporasi ditujukan untuk kepentingan korporasi, sehingga pembedaan dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan fisik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pertanggungjawaban pidana secara langsung kepada korporasi. Dalam perkembangannya, sangat dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban kepada korporasi

secara langsung dan pengurus korporasi, sehingga bentuk sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi adalah pidana denda dan sanksi pidana yang bersifat administratif serta bentuk sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pengurus korporasi adalah pidana badan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 10 KUHP.

VIII. Daftar Pustaka

Buku :

Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Ke-7/Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1/Edisi Ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dwidja Priyatno, 2009, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, CV. Utomo, Bandung.

Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H. Setiyono, 2009, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*

Indonesia, Cetakan Keempat/Edisi Kedua, Banyumedia Publishing, Malang.

Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi; Kebijakan Integral (Integral Policy) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Nuansa Aulia, Bandung.

Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Cetakan Ke-1, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif : Suatu Terobosan Hukum*, Cetakan.1, Sinar Grafika, Jakarta. Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung,

R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung.

Website :

<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, Metha Dewi Subakti, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, diakses pada tanggal 20 April 2015, pkl. 09.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 19 April 2015, pkl. 16.50 WIB.